

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan bahari berlimpah yang tersebar di seluruh wilayah. Kekayaan laut ini menjadi hak setiap anak bangsa untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan bangsa. Tentunya, dengan tidak melupakan kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikannya. Hasil pemanfaatan potensi dan kekayaan bahari Indonesia diharapkan dapat dinikmati oleh setiap masyarakat Indonesia secara merata. Untuk itu, pembangunan semestinya dapat dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia sehingga hasilnya dapat menyentuh sampai seluruh wilayah, termasuk wilayah perbatasan negara. Namun pendekatan pembangunan di masa lampau yang fokus pada wilayah perkotaan menjadikan wilayah pulau-pulau kecil hingga wilayah perbatasan tetap tampil dalam keterbatasan, meskipun memiliki ragam sumber daya di wilayah mereka.

Pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan dapat dilakukan melalui berbagai sektor termasuk sektor pariwisata. Pembangunan pariwisata pada umumnya diarahkan sebagai sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan

pengenalan dan pemasaran produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi unggulan juga telah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe (selanjutnya disingkat KKS). KKS merupakan satu dari sebelas Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Utara dan merupakan daerah otonom baru di ujung utara Indonesia yang berbatasan laut dengan Filipina bagian selatan. Ditetapkan sebagai wilayah perbatasan Negara melalui Undang Undang No.77 tahun 1957, KKS juga ditetapkan sebagai Daerah Perdagangan Lintas Batas berdasarkan Keputusan Presiden RI No.6 Tahun 1975. Berdasarkan letak dan kondisi geografis wilayah KKS, terdapat empat karakteristik yang dinilai sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di KKS, yaitu: (1) Sebagai Daerah Perbatasan, kawasan ini memiliki peluang dalam membangun kerja sama dengan negara tetangga, (2) Sebagai Daerah Kepulauan, kawasan ini terdiri atas gugusan pulau yang besar dan kecil berjumlah 105 buah pulau, dimana 26 buah pulau berpenghuni dan 79 buah pulau belum berpenghuni, (3) Sebagai Daerah Rawan Bencana Alam, hal ini berkaitan dengan keadaan topografi daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri dari daerah perbukitan dan pegunungan dengan struktur tanah yang labil, (4) Sebagai Daerah Tertinggal atau daerah miskin, Kondisi ini mengakibatkan terjadinya proses kemiskinan yang terstruktur. (sangihekab.go.id).

Semangat pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya bahari dalam membangun daerah tertuang dalam Visi Pembangunan Daerah 2011 – 2016 untuk

“Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai kabupaten bahari yang sejahtera”, dan didukung oleh Misi Pembangunan Daerah yang menetapkan bahwa “Pemantapan ekonomi daerah akan dilakukan melalui optimalisasi potensi bahari melalui kegiatan perikanan dan pariwisata (sangihekab.go.id). Kebijakan pemerintah yang sentralistik di masa lalu, dilakukan dengan orientasi pada pendekatan keamanan (*security*) yang tidak sebanding dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity*), menjadikan KKS sebagai daerah tertinggal dengan tingkat daya saing ekonomi yang lemah. Penetapan daerah tertinggal berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, serta karakteristik daerah. Hal ini berpengaruh pada lemahnya daya saing komoditas, SDM maupun sumber daya ekonomi.

KKS telah menjadi tempat transit dalam program *Sail* Bunaken 2009, *Sail* Morotai 2012, *Sail* Komodo 2013, dan *Sail* Tomini 2015, khususnya bagi partisipan yang masuk ke wilayah Indonesia dari Laut Tiongkok Selatan. Hal ini membuka peluang pengembangan pariwisata di KKS, sehingga untuk mengoptimalkan potensi yang ada diperlukan strategi pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakteristik KKS. Peluang pengembangan pariwisata di KKS didukung pula oleh dibukanya kembali bandara pengumpan skala tertier Yudha Tindas di Pulau Sangihe Besar, yang melayani jalur penerbangan penerbangan perintis Sangihe – Manado dan sebaliknya. Dalam pengembangannya, bandara ini direncanakan untuk peningkatan status menjadi bandara pengumpan skala sekunder untuk mendukung pengembangan jalur transportasi perbatasan dengan Filipina, seiring dengan semakin meningkatnya

kegiatan perekonomian di Filipina Selatan. Transportasi melalui jalur laut juga dapat diakses dengan jadwal pelayaran setiap hari. Tersedianya jalur transportasi menuju KKS memberikan pengaruh positif terhadap kunjungan wisata. Sejak beroperasinya bandara secara penuh di Sangihe tahun 2011, pergerakan wisatawan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya.

Salah satu kawasan yang memiliki potensi sumber daya bahari di KKS adalah Kawasan Nusa Tabukan (selanjutnya disingkat KNT). KNT merupakan gugusan pulau dengan keindahan alam pantai, pesisir, terumbu karang serta kehidupan bawah laut yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Hingga kini KNT mulai ramai dikunjungi dengan tujuan untuk melihat secara langsung kehidupan satwa laut tersebut. Pulau Bukide, salah satu pulau dalam kawasan ini merupakan satu dari sembilan spot penyelaman di KKS yang dikenal dengan *coral carpet* dan koloni ikan. Juga terdapat Pulau Poa dan Pulau Liang, dua pulau karang tidak berpenghuni dengan hamparan pasir putih, yang merupakan rumah bagi ribuan burung kumkum putih. Burung kumkum putih ini merupakan satwa langka yang dilindungi di Indonesia, dan oleh pemerintah desa setempat (Kampung Bukide) telah ditindaklanjuti dengan membuat peraturan kampung yang melarang masyarakat untuk berburu atau membunuh satwa tersebut.

Selain memiliki keragaman sumber daya alam, KNT juga dikenal sebagai wilayah perikanan tangkap yang menjadi penyuplai kebutuhan perikanan di pesisir utara Kepulauan Sangihe. Masyarakat nelayan tradisional yang mendiami kawasan ini merupakan bagian dari masyarakat bahari Sangihe yang sangat menghormati laut.

Dalam falsafah hidup masyarakat lokal, laut dianggap sebagai pemberi kehidupan. Penghormatan masyarakat bahari di kepulauan Sangihe dapat dilihat pada perbedaan bahasa atau penyebutan, masyarakat memiliki bahasa khusus di laut dengan makna yang lebih dalam. Penghormatan masyarakat terhadap laut juga dilakukan melalui penggunaan metode tangkap tradisional untuk menjaga kelestarian laut disekitar mereka.

Kekayaan sumber daya bahari di KNT tidak selaras dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Secara administratif KNT masuk dalam wilayah Kecamatan Nusa Tabukan dengan lima buah kampung didalamnya. Lemahnya daya saing ekonomi masyarakat di kawasan ini disebabkan antara lain oleh terbatasnya pilihan mata pencaharian penduduk pulau-pulau kecil yang cenderung homogen dan sangat tergantung pada sumberdaya pesisir dan laut. Secara keseluruhan, kegiatan ekonomi di KNT masih sangat tergantung pada aktivitas ekonomi di luar pulau, terutama pada Pulau Sangihe Besar sebagai induknya (*mainland*).

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No.1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014 – 2034, Kepulauan Sangihe masuk dalam peruntukkan pengembangan wisata bahari, sedangkan secara spesifik gugusan kepulauan Nusa (KNT) masuk dalam rencana pengembangan sebagai kawasan ekowisata laut dan pulau di perbatasan antara Negara. Pemanfaatan pulau – pulau kecil juga diatur dalam Undang – Undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau kecil. Pemanfaatan pulau-pulau kecil

dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan berikut ini, yaitu: a) konservasi, b) pendidikan dan pelatihan, c) penelitian dan pengembangan, d) budidaya laut, e) pariwisata, f) usaha dan industri perikanan secara lestari, g) pertanian organik, dan h) peternakan. Pengaturan ini juga terintegrasi dengan Undang – Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa pengembangan pariwisata bertujuan untuk : meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam budaya dan lingkungan, memupuk rasa cinta tanah air, memperkokoh jati diri bangsa serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Menyadari potensi dan daya Tarik yang terdapat di pulau – pulau kecil terkait potensi perikanan dan pariwisata, maka pemerintah menganggap perlunya dibuat kawasan pulau – pulau kecil sebagai destinasi ekowisata yang terintegrasi untuk memudahkan pengaturan, pengawasan dan upaya dalam memanfaatkan potensi yang ada di setiap daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Pilihan tersebut dinilai tepat karena mengingat ekowisata merupakan kegiatan yang berwawasan lingkungan (Oka Yoety, 2000). Pembangunan di pulau-pulau kecil harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang mengutamakan keseimbangan ekologi, ekonomi dan konservasi. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sendiri adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian aktivitas pembangunan ekonomi tidak dilarang, tetapi

dianjurkan dengan persyaratan bahwa laju (tingkat) kegiatan pembangunan tidak melampaui daya dukung (*carrying capacity*).

Salah satu upaya pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal adalah dengan mengembangkan pariwisata dengan konsep Ekowisata. Dalam konteks ini wisata yang dilakukan memiliki bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya-upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi lokal dan mendorong penghargaan yang lebih tinggi terhadap perbedaan budaya. Hal inilah yang mendasari perbedaan antara konsep ekowisata dengan model wisata konvensional (*mass tourism*) yang telah ada sebelumnya. Secara sederhana, konsep ekowisata menghubungkan antara perjalanan wisata yang memiliki visi dan misi konservasi dan kecintaan lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena keuntungan finansial yang didapat dari biaya perjalanan wisata digunakan juga untuk kebutuhan konservasi alam serta perbaikan kesejahteraan penduduk lokal. Ekowisata juga menekankan pada nilai dan manfaat edukatif dari setiap kegiatan yang dilakukan.

Dalam klaster pembangunan daerah, KNT masuk dalam klaster Manalu sebagai kawasan agropolitan, minapolitan dan pariwisata. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang minapolitan disebutkan bahwa minapolitan adalah suatu bagian wilayah dengan pusat kegiatan ekonomi yang memanfaatkan, mengelola, dan membudidayakan sumber daya kelautan dan perikanan, serta memiliki keterkaitan fungsional yang dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menumbuhkan daya saing regional. Konsep dasar Minapolitan sejalan dengan konsep

pengembangan ekowisata, dimana keduanya menekankan pada penguatan sinergi antara pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk merumuskan strategi yang tepat bagi pengembangan ekonomi kerakyatan.

Hingga kini pengembangan pariwisata di KKS dan KNT belum optimal karena berbagai faktor, seperti: keterbatasan infrastruktur, kurangnya SDM pariwisata, aksesibilitas, promosi, serta faktor lainnya. Perlunya dikembangkan pariwisata di KNT maupun di KKS dengan harapan adanya kontribusi nilai ekonomi baik bagi penerimaan daerah dalam tataran makro, maupun yang langsung diterima oleh masyarakat. Undang – Undang Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pariwisata di daerah masing – masing. Proses dan mekanisme pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, serta peluang untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam pariwisata menjadi lebih terbuka (Damanik dan Weber, 2006). Pengembangan pariwisata di KNT perlu direncanakan dan dikelola dengan baik untuk mencegah dampak yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata terhadap lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui konsep pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian pengembangan pariwisata di KNT tetap berada pada jalur yang benar menuju pariwisata yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan pedoman berdasarkan pertimbangan terhadap permasalahan berikut:

1. Apa saja komponen produk wisata dalam menunjang ekowisata bahari di Kawasan Nusa Tabukan?
2. Bagaimana kondisi lingkungan internal dan eksternal terhadap pengembangan ekowisata bahari di Kawasan Nusa Tabukan?
3. Bagaimana strategi dan program pengembangan ekowisata bahari di Kawasan Nusa Tabukan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi dan program pengembangan ekowisata bahari di Kawasan Nusa Tabukan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengidentifikasi potensi dan daya Tarik ekowisata bahari di Kawasan Nusa Tabukan.
2. Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dilihat dari kekuatan dan kelemahan, serta kondisi lingkungan eksternal dilihat dari peluang dan ancaman terhadap pengembangan ekowisata bahari di Kawasan Nusa Tabukan.
3. Untuk merumuskan strategi dan program pengembangan ekowisata bahari di Kawasan Nusa Tabukan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pariwisata, terutama yang terkait dengan pengembangan daya tarik ekowisata dan jenis wisata alternatif lainnya. Juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian ilmiah lainnya, terutama yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan pengembangan pariwisata di pulau – pulau di wilayah perbatasan Negara lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait dalam pengembangan ekowisata bahari di Kawasan Nusa Tabukan, terutama bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam merumuskan formulasi kebijakan pengembangan pariwisata. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi sumber informasi kepada instansi terkait dalam menyusun rencana dan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya di Kawasan Nusa Tabukan dan sekitarnya, dengan tetap berorientasi kepada aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.